KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sultan Yakin PT 0 Persen Bakal Sehatkan Demokrasi Indonesa
Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 12

Calon Pemimpin Ideal Terkendala Ambang Batas

Sultan Yakin PT 0 Persen Bakal Sehatkan Demokrasi Indonesia

Perdebatan seputar ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* semakin menarik sebagai diskursus publik maupun elite. Apalagi, banyak pihak mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengatakan, Presidential Threshold 20 persen wujud diskriminasi politik terhadap partai politik tertentu. Karenanya, judicial review terhadap UU tersebut bukan hanya berasal dari *civil society*, akademisi atau ahli hukum, tapi kader partai politik.

Permohonan agar MK menetapkan ambang batas pencalonan presiden sebesar nol persen menjadi hal yang wajar.

"Partai politik juga menjadi pihak yang paling dirugikan dengan ketentuan ini. Sebab, setiap partai memiliki visi dan *platform* politik yang berbeda," ujar Sultan melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Namun, lanjut dia, sikap sejumlah elite dan kader partai cenderung pragmatis dan tidak ideologis, sehingga aturan tentang Presidential Threshold 20 persen menjadi lumrah. Akibatnya, partai politik kehilangan peran dalam melahirkan calon pemimpin.

"Kalapun ada calon presidennya, ya itu-itu saja. Parpol gagal meregenerasi sel-sel kepemimpinan, berikut tugas edukasi politik bagi masyarakat. Pilihan berkoalisi dengan Pemerintah, membuat *landscape* demokrasi kita menjadi kering," jelas mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini.

Sultan berharap, pengalaman 2 Pemilu Presiden (Pilpres) dapat dijadikan pelajaran berharga. Ambang batas yang tinggi menyebabkan partai politik hanya terafiliasi dalam dua poros koalisi besar.

Alhasil, oligarki dengan kekuatan modalnya bermain untuk mempengaruhi hasil Pemilu serta kebijakan politik pemerintahan selanjutnya.

"Dengan kondisi seperti ini, Pemilu menjadi sekadar formalitas demokrasi. Pemilu tak memberi solusi kepemimpinan nasional yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi pemimpin yang sesuai kehendak oligarki," sesal Sultan.

Sebagai bangsa yang majemuk, sambung dia, perayaan demokrasi harusnya lebih variatif dan sukarela dalam menentukan pilihan politik. Sebab, banyak putera puteri terbaik bangsa yang harus disediakan ruang dan kesempatan politik oleh demokrasi, agar proses seleksi kepemimpinan nasional lebih kompetitif.

Menurutnya, ketentuan ambang batas 20 persen menjadi penyebab segregasi sosial politik bangsa selama ini. Hegemoni politik yang tidak relevan dengan semangat demokrasi ini harus diakhiri, agar Pemilu dapat memberi solusi kepemimpinan nasional yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan, DPR tidak mungkin lagi melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya untuk mengubah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold.

Menurutnya, revisi justru akan mengganggu tahapan Pemilu yang sudah dimulai. ■ ONI